

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR TUNAS JAYA GRAHA
TAHUN 2022**



**JALAN GAJAH MADA NO.85C KOTA BANDAR LAMPUNG
TELEPON: 0721 (8018074)**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Pada tahun 2022 PT. BPR Tunas Jaya Graha telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) sehingga membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya pertumbuhan kredit meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat di tengah pemulihan perekonomian atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR Tunas Jaya Graha memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK sehingga BPR Tunas dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Bandar Lampung. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Tunas didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Tunas.

BPR Tunas telah beroperasi lebih dari 15 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesenjangan. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Tunas selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2022 dan untuk di tahun mendatang, BPR Tunas Jaya Graha terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Yulius Kausar
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab penuh dalam kepengurusan BPR.		
	b. Mengelola BPR secara professional dan mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur di AD/ ART BPR dan peraturan perundangan.		
	c. Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, atau otoritas lainnya.		
	d. Menerapkan tatakelola pada setiap kegiatan usaha BPR.		
	e. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai.		
2.	f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
	g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.		
	h. Menyediakan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		
	Nama	:	Maria Nilawaty
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab dan membantu Direktur Utama dalam kepengurusan BPR.		
	b. Membantu Direktur Utama untuk mengelola BPR secara professional dan mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur di AD/ ART BPR dan peraturan perundangan..		
	c. Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, atau otoritas lainnya.		
	d. Menerapkan tatakelola pada setiap kegiatan usaha BPR.		
	e. Memastikan pelaksanaan kegiatan operasional BPR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
	f. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dan memastikan budaya kepatuhan pegawai terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;		
	g. Memastikan peningkatan kualitas SDM BPR dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.		
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		
	a. Penerapan Tata Kelola yang baik telah dilaksanakan secara konsisten.		
	b. Menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.		
	c. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum tanggal jatuh tempo.		
	d. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.		
	e. Budaya Kepatuhan telah ditanamkan kepada seluruh pegawai.		
	f. Monitoring dan penagihan kepada debitur macet dan menurunkan NPL telah dilaksanakan dengan baik.		

g. Pemenuhan realisasi target RBB 2022 telah dilaksanakan dengan baik.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Direksi senantiasa menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris serta menyediakan data dan informasi BPR secara akurat dan relevan kepada Dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Jamhari Hadipurwanta
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR.		
	b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.		
	c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, OJK dan institusi lainnya.		
	d. Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		
	e. Dewan Komisaris wajib memberitahukan apabila terdapat pelanggaran ketentuan perundang-undangan atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
	a. Direksi Melakukan Penerapan Tata Kelola BPR secara konsisten.		
	b. Direksi wajib menerapkan proses Manajemen Risiko yang efektif dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. BPR.		
	c. Direksi memastikan semua Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti sesuai komitmen.		
	d. Direksi memastikan semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti		
	e. Direksi senantiasa menanamkan Budaya Kepatuhan kepada seluruh pegawai.		
	f. Direksi melakukan Monitoring dan penagihan kepada debitur macet dan menurunkan rasio NPL.		
	g. Direksi melakukan Optimalisasi dan Pemenuhan target RBB 2022.		
Penjelasan Lebih Lanjut :			
	Dewan komisaris senantiasa memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan strategis BPR.		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :

Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite
BPR tidak memiliki Komite

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR tidak memiliki Komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR tidak memiliki Komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yulius Kausar	Rp0,00	0%
2.	Maria Nilawaty	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yulius Kausar	-	-	0%
2.	Maria Nilawaty	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yulius Kausar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Maria Nilawaty	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan terhadap sesama anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yulius Kausar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Maria Nilawaty	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap sesama anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Jamhari Hadipurwanta	Rp700.000.000,00	9.93%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham pada BPR sebesar 9,93%			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Jamhari Hadipurwanta	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Jamhari Hadipurwanta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada anggota direksi dan pemegang saham lainnya.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Jamhari Hadipurwanta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga pada anggota direksi dan pemegang saham lainnya.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp293.000.000,00	1	Rp70.200.000,00
2.	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp293.000.000,00		Rp70.200.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus BPR yaitu Direksi dan Komisaris berupa gaji.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi mendapatkan fasilitas transportasi berupa mobil dinas sebanyak 2 unit untuk 2 orang dan juga mendapatkan fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.4 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji Direksi tertinggi sebesar Rp. 18.000.000,- per bulan, Gaji Direksi terendah sebesar Rp. 16.000.000 per bulan. Gaji Dewan Komisaris sebesar Rp. 8.100.000,- per bulan. Sedangkan Gaji Pegawai Terendah sebesar Rp. 3.167.663 per bulan dan Gaji Pegawai Tertinggi Sebesar Rp. 7.445.030 per bulan.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	21 Maret 2022	6	1. Langkah-Langkah Strategis Jangka Pendek BPR 2. Dana Pihak Ketiga 3. Kredit ASN dan Asuransi 4. Kesejahteraan Karyawan 5. Kredit Macet dan Hapus Buku
2.	09 Juni 2022	18	1. Membahas Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis 2022 2. Membahas Isu-Isu Strategis BPR.
3.	14 September 2022	18	1. Membahas hasil pemeriksaan umum OJK tahun 2022. 2. Membahas isu-isu strategis BPR.
4.	08 Desember 2022	18	1. Membahas Rencana dan Strategi Jangka Pendek BPR 2023. 2. Membahas Penetapan RBB 2023.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris mengadakan rapat 4 kali dalam 1 tahun.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Jamhari Hadipurwanta	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris hadir rapat secara fisik 4 kali dalam setahun				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
BPR tidak terdapat Fraud								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
BPR telah menyelesaikan permasalahan hukum nasabah an Pipit Elizar di tahun 2022.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
BPR tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	04 Februari 2022	Sosial	Pemberian Sumbangan Renovasi untuk Masjid di SMPN 18 Bandar Lampung	SMPN 18 Bandar Lampung	Rp500.000,00
2.	12 Agustus 2022	Sosial	Sumbangan untuk kegiatan HUT RI ke 77 di Kelurahan Tanjung Baru	Kelurahan Tanjung Baru	Rp100.000,00
3.	05 September 2022	Sosial	Sumbangan untuk kegiatan HUT Pemuda Pancasila Kota Bandar Lampung	Pemuda Pancasila Kota Bandar Lampung	Rp100.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
BPR memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial berupa Pemberian Sumbangan Renovasi untuk Masjid di SMPN 18 Bandar Lampung, Sumbangan untuk kegiatan HUT RI ke 77 di Kelurahan Tanjung Baru, dan Sumbangan untuk kegiatan HUT Pemuda Pancasila Kota Bandar Lampung di tahun 2022					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR TUNAS JAYA GRAHA
Alamat	: JALAN GAJAH MADA NO.85C KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor Telepon	: 0721 (8018074)
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp2.541.582.900,00
Total Aset	: Rp23.376.151.664,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR TUNAS JAYA GRAHA Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.7 dengan predikat Cukup Baik (3)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.40	0.480
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.69	0.404
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.00	0.300
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3.52	0.352
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.23	0.223
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.10	0.053
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.50	0.250
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.75	0.206
10	Rencana Bisnis BPR	2.74	0.206
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.75	0.206
Nilai Komposit			2.700
Predikat Komposit			Cukup Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.4)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sudah sesuai dengan prinsip tata kelola. Saat ini Jumlah anggota Direksi BPR Tunas Jaya Graha berjumlah (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur. BPR belum memiliki Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.69)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris sudah sesuai dengan prinsip tata kelola. Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR BPR Tunas Jaya Graha berjumlah (satu) orang yaitu komisaris. BPR belum memiliki Komisaris Utama.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR Tidak Menerapkan Komite berdasarkan modal inti dan ketentuan OJK.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3)

BPR Tunas Jaya Graha telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 3.52)

BPR Belum memiliki Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan namun telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.23)

PE Audit Intern di BPR Tunas Jaya Graha telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.1)

BPR Tunas JayaGraha telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan persetujuan RUPS. Hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.5)

PT. BPR Tunas Jaya Graha telah menerapkan Manajeme Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.75)

PT. BPR Tunas Jaya Graha telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah

melaksanakannya secara disiplin. BPR Tunas dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.74)

Rencana Bisnis Bank BPR Tunas Jaya Graha telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.75)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Tunas Jaya Graha telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR Tunas juga telah menyusun Laporan Bulanan dan Laporan Keuangan sesuai ketentuan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

BPR senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik sehingga menjadi Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola BPR. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola BPR Tunas Jaya Graha masih perlu melengkapi struktur pengurus yang kosong yaitu Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan Komisaris Utama.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko serta menjunjung tinggi nilai-nilai inti BPR. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu lebih intensif dalam menindaklanjuti hasil temuan OJK, Audit Internal dan Audit Eksternal serta melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator sehingga dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak pertumbuhan kredit yang cukup baik ditengah-tengah kebangkitan perekonomian pasca pandemi covid-19. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2022, BPR masih membukukan laba negatif sehingga mempengaruhi aspek permodalan.

Bandar Lampung, 25 Januari 2023

PT BPR TUNAS JAYA GRAHA

Disiapkan Oleh



Dany Afriandro A.P
PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Disetujui Oleh



Yulius Kausar
Direktur Utama

Diketahui Oleh



Jamhari Hadipurwanta
Komisaris